

BAB IV

KEBIJAKAN EKONOMI KOREA SELATAN DALAM PENYELESAIAN KRISIS NUKLIR SEMENANJUNG KOREA

A. Pertumbuhan Ekonomi Korea Selatan

Modernisasi dan pembangunan ekonomi Korea sebenarnya sudah dimulai pada abad ke-19, yaitu pada masa dinasti Yi (1860-1910) yang melakukan reformasi pertanian dan pembangunan sarana-sarana fisik kerajaan Korea pada saat itu. Pengembangan pembangunan infrastruktur perekonomian kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan kolonial Jepang pada tahun 1910-1945.¹

Di masa penjajahan Jepang ini, mulai diperkenalkan pembangunan perekonomian modern, misalnya pembangunan infra struktur seperti waduk untuk irigasi, jalan raya, jembatan, dan sarana transportasi lain yang bertujuan untuk mengangkut hasil bumi dan mineral Korea. Walaupun baru memperkenalkan sedikit dari sistem perekonomian modern, Jepang juga telah mulai memperkenalkan sistem perindustrian, kompleks perindustrian perindustrian tekstil dan makanan adalah contoh dari industrialisasi yang diperkenalkan oleh Jepang pada rakyat Korea.

Setelah berakhirnya perang dunia II, Korea Selatan yang kemudian dibawah pendudukan Amerika Serikat mendapatkan bantuan dari PBB dan Amerika Serikat guna membangun perekonomian Korea yang telah mengalami kemerosotan dan kekurangan pangan semenjak ditinggalkan pemerintah kolonial Jepang. Perkembangan dari pertumbuhan ekonomi Korea Selatan berawal dari masa pemerintahan presiden pertama Korea Selatan Sygman Rhee.

¹Richard M. Stears, et.al., *The Chaebol : Korea's New Industrial Might*, 1989, Harper & Row Pulishers, New York, hal.9-10.

Di masa pemerintahan Sygman Rhee ini ketergantungan terhadap bantuan luar negeri, terutama bantuan dari Amerika Serikat sangat ditunjang pula oleh doktrin antikomunisme, antipati terhadap Jepang dan patriotisme inilah yang kemudian menyebabkan ketergantungan negara pada bantuan pihak asing terutama Amerika Serikat semakin tinggi. Walaupun telah mendapat dukungan secara penuh dari Amerika Serikat, perekonomian Korea Selatan semakin merosot, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Semenjak di bawah pemerintahan Jepang, Korea menjadi pengeksport produk-produk pertanian, akan tetapi sejak 1953 pertumbuhan penduduk meningkat dengan cepat dan berimbas pada kebutuhan pangan yang meningkat pula. Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat, Korea Selatan baru dapat memenuhi dari hasil pertanian lokal (dalam negeri). Hasil pertanian dalam negeri yang seharusnya menjadi komoditas ekspor andalan pada akhirnya harus digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri Korea Selatan. Ketergantungan pendapatan nasional negara terhadap hasil pertanian mengakibatkan kejatuhan pendapatan negara ketika terjadi ledakan penduduk lokal yang mengkonsumsi hasil pertanian lokal Korea Selatan.
2. Dihadapkan pada konfrontasi yang belum selesai dengan Korea Utara. Ancaman dari terjadinya konfrontasi lanjutan dengan Korea Utara juga cukup mempengaruhi terhadap perkembangan perekonomian dalam negeri Korea Selatan, hal ini dikarenakan stabilitas keamanan negara yang tidak stabil mengakibatkan banyak kekhawatiran dari berbagai pihak akan adanya perang yang terulang kembali. Kekhawatiran ini juga dialami oleh para pelaku ekonomi, termasuk investor-penanam modal.
3. Administrasi yang baru saja lepas dari perang Korea menyebabkan pemerintahan yang disibukkan dengan restrukturisasi sesudah perang dan pemeliharaan tatanan politik. Sektor perekonomian belum begitu mendapat perhatian karena fokus dari pemerintah adalah mengatur kembali tatanan politik setelah perang yang masih banyak ketimpangan.

Akan tetapi, di masa pemerintahan Sygman Rhee masih ada beberapa nilai positif yang turut mendukung dan meletakkan dasar bagi perekonomian

Korea Selatan. Di masa pemerintahan ini telah diletakkan landasan bagi pembangunan masa depan Korea Selatan melalui *land reform*. Tujuan dari kebijakan itu adalah untuk membangun kembali daerah pertanian, membagi kembali tanah-tanah pertanian yang dimasa dinasti Yi hingga kolonial dikuasai oleh kaum *Yang Ban* dan para tuan tanah, dan juga memberi insentif pada para petani supaya mampu meningkatkan taraf hidupnya.² Hal ini menyebabkan kenaikan pendapatan di sektor pertanian dan mampu menyerap 66 persen tenaga kerja.

Perekonomian Korea Selatan mengalami perkembangan pasang surut seiring dengan perkembangan politik dan kebijakan dari masing masing masa pemerintahan. Di masa pemerintahan Park Chung Hee, kemajuan perekonomian dicapai dengan menerapkan doktrin politik. Penerapan doktrin politik di masa pemerintahan Park ini adalah suatu strategi pembangunan yang menekankan pada peran pemerintah yang sangat besar dalam aktifitas perekonomian dan mobilisasi berbagai segmen dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam industrialisasi. Perkembangan perekonomian makin terasa di masa pemerintahan ini. Di masa pemerintahan ini kebijakan yang otoriter dan represif menciptakan stabilitas politik domestik yang berpengaruh juga pada perkembangan pembangunan perekonomian nasional Korea Selatan. Diawal tahun 1960-an, presiden Park mencetuskan program rencana pembangunan lima tahun. Program rencana lima tahunan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Lima Tahun I (1962-1966)

Di dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun I ini diberlakukan ekonomi campuran yang dibatasi dengan konsep kapitalisme terpimpin. Di dalam konsep ini diperkenankan prinsip kebebasan berusaha dan berinisiatif dan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung memberi petunjuk pada kelompok/institusi yang sedang berusaha ini.

²Andrew C. Nahm, *Introduction to Korean History and Culture*, 1993, Hollym Corp. Publishers, Seoul, hal.320

Di tahun 1964 pemerintahan Park merubah kebijakan orientasi perekonomian dari *Import-Substitution-industry* menjadi *Export-Oriented-Industry*. Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk lebih mengenalkan produk – produk dalam negeri Korea Selatan di dunia internasional. Produk yang pertama kali dipromosikan adalah barang barang manufaktur ringan. Dengan merubah kebijakan orientasi perekonomian ke arah *Export-Oriented-Industry* pemerintah bertujuan untuk memasarkan produk produk dalam negeri Korea Selatan. Hal ini dilakukan sebagai langkah promosi produk dalam negeri ke luar negeri.

2. Rencana Pembangunan Lima Tahun II (1967-1971)

Di Rencana Pembangunan Lima Tahun II ini peranan swasta semakin diperbesar dan peran pemerintah makin diperkecil. Di periode inilah terjadi transisi dari masyarakat tardisional ke masyarakat industri karena struktur ekonomi mulai berubah. Perubahan ini juga seiring dengan perubahan jumlah penduduk yang berpindah mata pencaharian ke sektor industri dari sektor agraris. Di periode ini investasi rata-rata 20 persen dari GNP selama Rencana Pembangunan Lima Tahun I menjadi lebih dari 30 persen pada Rencana Pembangunan Lima Tahun II.

3. Rencana Pembangunan Lima Tahun III (1972-1976)

Di dalam periode ini muncul rezim Beraucratic-otoritarian, hal ini karena dikeluarkannya konstitusi Yusin pada tahun 1972. Dengan dikeluarkannya Konstitusi Yusin ini semakin memperkokoh pemerintah untuk memimpin negara dengan otoriter dan lebih birokratis. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi terus meningkat hingga memasuki Rencana Pembangunan Lima Tahun IV.

4. Rencana Pembangunan Lima Tahun IV (1977-1981)

Perekonomian nasional Korea Selatan mengalami pergeseran dari industri ringan ke industri berat. Pergeseran ini menandakan bahwa perkembangan perindustrian di masa pemerintahan Park cukup pesat, karena industri ringan yang telah berhasil mampu menyokong usaha pemerintah

untuk mengembangkan ke arah industri berat. Presentasi perkembangan industri ini adalah 51,4 persen dari seluruh industri di tahun 1978 dan menjadi 55,4 persen pada tahun 1980.

Setelah melewati lebih dari tiga dekade, pertumbuhan Korea Selatan mulai terlihat hasilnya di masa pemerintahan Kim Dae Jung. Di masa pemerintahan ini, pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 8,6 % dan menjadi negara dagang terbesar ke sebelas di dunia. Dalam kurun waktu kurang dari dua generasi, Korea Selatan telah mampu menjadikan dirinya sebagai salah satu negara termaju di dunia di bidang perkapalan, perpabrikasi, elektronika, semi konduktor, dan mobil. Pasar keuangan internasional secara positif mengakui keberhasilan ekonomi Korea, termasuk pertumbuhan tinggi yang terus menerus, inflasi yang sedang, tabungan nasional yang tinggi, defisit eksternal yang minimal dan surplus anggaran pemerintah yang signifikan.

Di tahun 1997 krisis ekonomi melanda Asia. Korea Selatan juga terkena dampak dari krisis ekonomi yang mengglobal ini. Pada masa krisis ini timbul kekhawatiran dari para investor untuk berinvestasi lebih lanjut di Korea Selatan. Krisis juga telah menyebabkan masalah pengangguran yang serius yang menyebabkan kesulitan kesulitan sosial dan ekonomi Korea Selatan.

Di masa pemerintahan Kim Dae Jung ini, Korea Selatan mengambil tindakan tindakan yang lebih komprehensif. Di bawah pimpinan Kim Dae Jung kebijakan ekonomi dilakukan dengan langkah penyesuaian yang lebih keras untuk mengatasi krisis ekonomi. Pemerintah mengambil langkah untuk mempromosikan reformasi di beberapa bidang. Reformasi ekonomi tersebut mencakup restrukturisasi sistem yang dipakai *Chaebol*, promosi fleksibilitas di pasar tenaga kerja, liberalisasi pasar domestik, dan daya tarik bagi investasi asing.³

Restrukturisasi juga dilakukan pada bidang keuangan. Sebuah ekonomi modern yang berbasis pasar tidak akan efisien tanpa lembaga – lembaga keuangan yang dinamis dan diawasi dengan baik. Untuk mencapai kebutuhan penting ini, Komisi Pengawas Keuangan (FSC) yang berfungsi

³Pelayanan Informasi Korea, *Korea Selayang Pandang*, Badan Informasi Korea, Seoul, Republik Korea 1999, hal 70

sebagai sebagai sebuah mekanisme pengatur yang menetapkan praktek praktek bank secara universal, telah menciptakan sebuah peraturan dan pengawasan baru yang lebih berhati hati dan penjadwalan untuk pelaksanaan reformasi. FSC memainkan peran penting dalam mempromosikan Korea karena mudah berubahnya pasar pasar keuangan internasional. Dalam proses reformasi sektor keuangan, pemerintah telah menutup beberapa lembaga keuangan yang tidak dapat berjalan dengan baik. Bank bank yang masih dapat berjalan meneruskan dengan mengikuti tindakan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh FSC untuk memperbaiki kinerja mereka.

Restrukturisasi juga dilakukan untuk sektor keuangan non – bank. Langkah restrukturisasi ini antara lain dengan menghentikan dan mengambil alih empat perusahaan asuransi jiwa yang bangkrut. Dan sebanyak 79 badan keuangan non – bank telah dihentikan atau izin mereka dicabut.

Pemerintah juga memobilisasi sumber sumber fiskal sejumlah 64 trilliun Won (kurang lebih 50 milyar dolar AS) untuk mendukung lembaga lembaga keuangan yang masih berjalan sehubungan dengan rekapitalisasi mereka dan menyelesaikan utang utang mereka. Lembaga lembaga keuangan juga mengintensifkan usaha – usaha rehabilitasi mereka sendiri, termasuk perampingan dan perangsangan investasi modal asing.

Restrukturisasi lain yang dilakukan di masa pemerintahan ini adalah di dalam sektor korporat. Sejumlah perusahaan yang tidak berjalan dipaksa untuk menghentikan operasi mereka sementara proses penyesuaian dengan bank bank pemberi kredit dimulai terhadap perusahaan perusahaan yang masih berjalan. Tindakan legislatif untuk memperkuat transparansi manajemen korporat, pelepasan jaminan jaminan pembayaran dan memperkuat pertanggung jawaban pengawasan pemegang saham dan manajemen juga diterapkan.

Restrukturisasi terhadap korporasi *Chaebol* difokuskan pada lima *Chaebol* terbesar di negeri ini. Restrukturisasi ini dilakukan karena peran *chaebol* sangat besar dalam pembangunan perekonomian Korea Selatan.

Restrukturisasi terhadap lima *Chaebol* terbesar ini antara lain mencakup pada rencana perbaikan struktural permodalan, termasuk likuidasi cabang cabang yang tidak berjalan, peniadaan jaminan dan pengurangan *eksposure* bank yang besar. Dengan diambilnya keputusan ini mempersempit konglomerat untuk mengkhususkan diri pada tiga sampai lima sektor inti yang memungkinkan mereka berhasil berkompetisi secara global. Cabang cabang *chaebol* juga dikurangi dari dua ratus enam puluh empat menjadi hanya seratus tiga puluh dengan masing masing *chaebol* memiliki rata rata lima belas sampai dua puluh lima afiliasi saja.

Perampingan lima *chaebol* utama erat hubungannya dengan restrukturisasi tujuh target industri, termasuk semi konduktor, petrokimia, penerbangan, dan lok lok kereta api. Pihak perbankan juga turut mengawasi kemajuan reformasi lima *chaebol* utama ini. Bank Bank pemberi kredit di masa ini telah mampu untuk mendesak *Chaebol - chaebol* menjual unit unit mereka yang tidak produktif. Mereka juga dapat menghentikan perluasan pinjaman pinjaman baru kepada afiliasi afiliasi mereka yang tidak dapat terus berjalan. Disamping restrukturisasi terhadap lima *chaebol* utama tadi, lebih dari dua ratus lembaga keuangan telah menandatangani "Persetujuan Restrukturisasi Korporat" untuk memudahkan "Program Program Percobaan" yang melibatkan cabang – cabang *chaebol* yang secara keuangan lemah tetapi masih dapat berjalan dan juga perusahaan perusahaan non *chaebol*. Perusahaan kecil dan menengah kemudian dapat mengambil keuntungan dari perluasan lingkup program ini karena dapat makin berkembang.

Di masa pemerintahan Roh Moo Hyun, pemerintahan dijalankan dengan fokus utama di bidang pembangunan perekonomian masih dominan mewarnai kebijakan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah lebih diperjelas dengan menyampaikan beberapa rencana pembangunan infrastruktur yang nantinya akan dapat mendukung kegiatan perekonomian.

Di masa pemerintahan Roh Moo Hyun ini mencoba untuk mengembangkan Korea menjadi pusat perekonomian Asia Timur Laut, beberapa cara yang diambil adalah:⁴

1. Membuat sebuah sistem kerjasama ekonomi Asia Timur Laut
2. Mendorong pertukaran dan kerjasama ekonomi antar Korea.
3. Membangun pusat logistik dan bisnis.

Dalam rangka merencanakan membangun pusat logistik di Asia Timur Laut melalui beberapa langkah di bawah ini :

1. Membangun bandara Internasional Incheon sebagai pusat bandara Asia Timur Laut, sambil mempromosikan pelabuhan Gwangyong dan Busan menjadi pelabuhan pusat daerah
2. Mengembangkan bandara Internasional dan pelabuhan Incheon sebagai pusat logistik wilayah metropolitan Seoul.
3. Menghubungkan kembali dua jalur kereta api dan jalan raya antar – Korea yang sedang dibangun, dan membangun jaringan transportasi yang menghubungkan dengan jalur kereta api trans – cina (ICRA) . Dan juga membangun jaringan informasi logistik terpadu yang menghubungkan bandara dan pelabuhan pada tahun 2015.

Jika dilihat di masa pembangunan perekonomian pemerintahan Roh Moo Hyun ini pemerintah mampu untuk menopang perekonomian dalam negerinya, akan tetapi dimasa pemerintahan Roh ini kemudian diperluas lagi sehingga potensi-potensi yang ada di luar negeri juga bisa menopang perekonomian dalam negeri Korea Selatan, salah satu jalannya adalah dengan membangun dan meningkatkan potensi infrastruktur yang ada sehingga dapat berdaya guna maksimal untuk mencapai kemajuan perekonomian.

B. Arti Penting Amerika Serikat dalam Perekonomian Korea Selatan

Peran Amerika Serikat dalam perkembangan perekonomian Korea Selatan cukup besar. Sesudah terjadinya perang dingin Korea Selatan mulai membangkitkan perekonomiannya dengan mengejar pertumbuhan yang berorientasi ekspor. Lingkungan ekonomi internasional yang selalu

⁴Pelayanan Informasi Korea, *Fakta Tentang Korea*, Badan Informasi Nasional, Seoul, Republik Korea 2003 hal 60

berkembang dan berubah menyebabkan Korea Selatan banyak melakukan kerjasama ekonomi dalam berbagai bentuk dengan negara maju seperti Jepang Amerika Serikat, dan beberapa negara maju di kawasan Eropa.

a. Amerika Serikat Sebagai sumber alih teknologi dan ilmu pengetahuan Korea Selatan .

Pada tahun 1966-1967, dengan tujuan untuk membangkitkan kembali pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi Korea Selatan dipusatkan pada pengenalan, penyerapan, dan penerapan teknologi dari luar (asing). Ketika bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mulai mengalami kemajuan setelah mencoba untuk mengenal, menyerap, dan menerapkan teknologi yang berbasis pada teknologi asing, Korea Selatan mulai menekankan pada perencanaan dan pengadaan proyek nasional R & D untuk meningkatkan ketrampilan pengetahuan dan teknologi. Sejak awal 1990-an, pemerintah telah memberikan perhatian pada tiga hal, yaitu: membantu pengembangan penelitian ilmu pengetahuan dasar, menjaga distribusi dan penggunaan sumber R & D secara efisien, dan meluaskan kerja sama internasional.

Keberhasilan dalam membangkitkan kembali pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dicapai cara "berguru" kepada teknologi asing termasuk juga Amerika Serikat dan negara – negara maju lainnya di kawasan Eropa. Kebijakan tersebut berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian Korea Selatan. Perkembangan yang pesat dalam sektor industri adalah contoh dari keberhasilan Korea Selatan dalam menyerap iptek yang didapat dari negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara maju teknologi lainnya di kawasan Eropa. Industri ringan yang mengintensifkan tenaga buruh adalah awal dari pertumbuhan ekonomi. Kemudian secara perlahan digantikan dengan industri berat dan kimia yang memenuhi lebih dari separuh hasil manufaktur negara ini secara keseluruhan. Korea kemudian juga mampu menghasilkan berbagai mesin dan perlengkapan industri.

Berikut adalah tabel komoditi ekspor utama di Korea Selatan pada tahun 1968 dan tabel perkembangan produk-produk pabrikan.⁵

Tabel.1

Komoditi Ekspor Utama di Korea Selatan pada Tahun 1968 21

Komoditi	Ekspor (juta \$ AS)	Persen (%)
Kayu Lapis	65,6	13,1
Rambut Palsu	35,5	7,1
Garmen Pakaian Dalam	28,7	5,7
Garmen lain	26,8	5,4
Bahan Mentah Sutera	18,0	3,6
Ikan Segar	16,9	3,4
Serat Tenun	16,7	3,3
Rumput Laut Kering	13,7	2,7
Serat Tenun Kapas	13,3	2,7
Biji Tungsten	11,1	2,2
Lain-lain	254,1	52,0
Jumlah	500,4	100,0

Sumber : Departemen Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan

Tabel.2

Produk-Produk Pabrikan Korea Selatan

Tahun	Perpabrikan Mobil	Pesanan Pembuatan Kapal	Perpabrikan Baja (1000metrik/tonase)

⁵Park Chang – ho dan Anggoro Sigit Sutanto., dkk , *Gerakan Masyarakat Baru di Korea : Filosofi dan Aplikasi Saemaul Undong*, Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda DEPDIKNAS dan Korea International Cooperation Agency (KOICA), 2002 hal 35

	(Dalam Ribuan)	(1000metrik/tonase)	
1970	29	-	7,310
1980	123	1,690	9,341
1990	1,322	4,382	24,868
1995	2,530	7,133	36,772
1997	2,818	12,749	42,554
1999	2,843	11,843	41,042
2000	3,115	20,686	43,107
2002	3,148	9,755	51,983

Sumber : Departemen Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan

Demikian juga perkembangan industri sampingan seperti industri elektronik juga merupakan sektor pertumbuhan penting yang turut menjadi alat pembangkit penting nilai tukar mata uang asing.

b. Amerika Serikat sebagai Penanam Modal Asing

Di awal tahun 1960, Korea Selatan sangat ketat menyaring para penanam modal asing yang akan menanam modalnya di Korea Selatan. Akan tetapi ketika kondisi lingkungan ekonomi global berubah, pemerintah Korea Selatan di tahun 1984 menerapkan undang undang yang baru yang mengatur tentang Investasi Asing Langsung (FDI). Undang undang ini makin memperjelas aturan tentang investasi asing langsung. Setelah diberlakukannya undang undang ini Investasi Asing Langsung (FDI) yang masuk ke Korea Selatan secara teratur meningkat dari tahun 1984. Berikut adalah tabel investasi langsung oleh pihak asing di Korea Selatan

Tabel.3

Tabel Investasi Langsung oleh Pihak Asing di Korea Selatan

(unit : Milyar Dollar AS)

Tahun	Total	A S	Jepang	Lain – Lain				
				Total	Hong kong	Jerman	Inggris	Prancis
1980	143,1	70,6	42,5	30,0	0,5	8,6	2,3	-
1985	532,26	108,0	364,3	59,9	13,4	11,3	12,3	5,1
1990	802,6	317,5	235,9	249,2	3,0	62,3	44,8	22,4
1995	1.9472	644,9	418,3	878,2	58,0	44,6	86,7	35,2
1997	6.970,0	3.189,6	265,7	3.515,6	84,6	398,1	258,6	410,7
1998	8.852,6	2.976,0	503,0	5.373,0	38,4	786,8	60,0	367,5
1999	15.541,5	3.379,0	1.750,0	10.052,0	461,0	960,0	479,0	760,0
2000	15.216,7	2.922,0	2.448,0	10.327,0	123,0	1,599	84,0	607,0
2001	11.291,8	3.890,0	772,0	7.208,0	167,0	459,0	432,0	426,0
2002	9.101,0	4.500,0	1.403,0	3.198,0	234,0	284,0	115,0	111,0

Sumber : Departemen Pertiagaan, Industri dan Energi Korea Selatan

Partisipasi asing yang aktif sangat penting bagi ekonomi Korea Selatan karena dapat menjamin pertumbuhan jangka panjang yang bertahan. Pada tahun 2000, jumlah keseluruhan FDI adalah 15,2 milyar dolar AS dan tahun 2001 jumlah keseluruhannya mencapai 11,2 milyar dolar AS. Dengan dukungan dan kebijakan pemerintah yang memudahkan investasi asing masuk di Korea, penanaman investasi di Korea berkembang pesat. Strategi dengan meliberalisasikan perekonomian untuk para penanam modal asing ini adalah upaya untuk mengembangkan pasar modal terpusat. Pengembangan pasar modal terpusat pada dua kebijakan yang saling berhubungan, yaitu liberalisasi pasar dan penambahan pasar. Liberalisasi pasar modal akan secara langsung meningkatkan akses Korea Selatan kepada modal dan teknologi asing, sementara pertumbuhan pasar akan memperbaiki efisiensi operasional pasar modal.

C. Arti Penting Korea Utara Terhadap Perekonomian Korea Selatan.

Arti penting Korea Utara bagi Korea Selatan sekaligus memberikan implikasi yang sangat positif bagi kebijakan Korea Selatan terhadap krisis nuklir di Semenanjung Korea. Dalam dinamika krisis nuklir dan persenjataan, peningkatan kemampuan persenjataan suatu negara juga meningkatkan kadar ancaman yang mungkin dirasakan oleh negara lain. Pemilikan senjata yang lebih rendah akan mengurangi persepsi tingkat ancaman itu tanpa mengubah kekuatan relatif dan mungkin akan membuka jalan ke arah penyelesaian politik. Selama tingkat pemilikan persenjataan masih tinggi, selama itu penyelesaian melalui jalur politik mungkin akan selalu menemui jalan buntu. Pengurangan senjata tidak mungkin terjadi selama hubungan politik belum baik. Sebaliknya, hubungan politik tidak akan semakin membaik, kalau dalam suatu sistem yang anarkis tidak ada saling percaya antar negara satu dengan yang lain. Dalam keadaan seperti ini memiliki senjata yang canggih dianggap sebagai cara terbaik untuk meningkatkan keamanan nasionalnya. Perdebatan akan terus berlangsung tentang bagaimana harus keluar dari lingkaran setan ini. Dalam kaitan dengan itu, kerjasama non militer dapat memainkan peranan penting karena kerjasama politik saja tanpanya tidak akan mampu menciptakan hubungan yang stabil untuk jangka waktu yang lama, dan kerjasama ekonomi memainkan peran yang paling penting dalam upaya mengatasi konflik termasuk krisis nuklir sekalipun. Hubungan dan kerjasama bidang ekonomi antar dua negara dapat meredakan atau mengurangi kecenderungan konflik. Kaum liberal beranggapan bahwa meningkatnya hubungan ekonomi akan memperbesar kemungkinan suatu negara untuk memperoleh keuntungan bersama, jika negara itu memilih kerjasama dan bukan konflik. Jaringan kerjasama yang saling menguntungkan ini justru sebagai pengikat dan merasa saling tergantung satu sama lain. Korelasi hubungan ekonomi tersebut, jika ia memenuhi persyaratan tertentu, dapat mengurangi kemungkinan konflik.⁶

⁶Lloyd J. Dumas, "Economics and Alternative Security: Toward a Peacekeeping International Economy", dalam Burns H. Weston, ed., *Alternative Security: Living Without Nuclear Deterrence*, (Boulder, CO, : Westview Press, 1990), hal.155-170

a. Sebagai Pasar baru di Kawasan Semenanjung Korea.

Hubungan perdagangan antara dua Korea ini sebenarnya cukup berkembang dan berjalan dengan baik. Kebijakan pemerintah Korea Selatan yang cukup liberal dan demokratis juga berpengaruh pada pengambilan kebijakan ekonomi terhadap Korea Utara.

Usaha Korea Selatan untuk menjadikan Korea Utara sebagai mitra dan pasar di Semenanjung Korea ini dapat terlihat mencolok ditahun 1998. Proses sebuah pasar (ada jual beli) juga terlihat di tahun 1998, dalam perdagangan antar Korea kegiatan ekspor dan impor berjalan dan berkembang pasang surut seiring dengan perkembangan politik.

Volume perdagangan meningkat sampai 211 juta dolar AS pada Desember dari 11 juta dolar AS di bulan Januari. Untuk barang-barang seperti tekstil dan bahan-bahan kimia dikapalkan dari Korea Selatan ke Korea Utara. Berikut adalah tabel perkembangan perdagangan antar Korea di tahun 1998

Tabel. 4
Perdagangan Antar-Korea (Januari-Desember 1998)
(Satuan 1.000 AS)

Tahun	Impor dari Utara	Ekspor dari Utara	Jumlah
1998.1	6,575	5,011	11,586
1998.2	5,977	3,762	9,739
1998.3	4,370	7,719	12,089
1998.4	4,641	7,024	11,665
1998.5	4,622	8,930	13,552
1998.6	5,806	13,370	19,176
1998.7	8,256	13,986	22,242

1998.8	12,065	4,131	16,196
1998.9	11,663	18,994	30,657
1998.10	10,640	23,404	34,044
1998.11	9,781	14,421	24,202
1998.12	7,867	10,831	18,698
Jumlah	92,262	131,583	223,846

Sumber : Departemen Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan

Beberapa langkah ditempuh oleh pemerintah untuk dapat menciptakan pasar baru antara Korea Selatan dan Korea Utara. Pada tanggal 30 April 1998 dengan tujuan agar kerjasama ekonomi antar Korea semakin luas, pemerintah mengizinkan para ketua grup bisnis besar dan juga organisasi-organisasi ekonomi untuk mengunjungi Korea Utara dengan tujuan bisnis. Hal ini cukup mendapatkan hasil yang positif, contohnya Grup Hyundai kemudian membuat proyek wisata ke Gunung Kumgang dan menanamkan investasinya untuk proyek ini. Di bidang perdagangan dan usaha bisnis, pemerintah menaikkan jumlah barang-barang untuk diimpor yang sebelumnya dibatasi pengirimannya. Pemerintah juga mempermudah pembatasan pembatasan pengapalan bagi barang-barang produksi perusahaan Korea Selatan di Korea Utara dan mempermudah pembatasan-pembatasan jumlah investasi yang diperbolehkan di Korea Utara. Berikut adalah tabel perdagangan antar Korea dari tahun 1998 hingga 2002

Tabel. 5

Perdagangan antar Korea dari 1998 – 2002

(unit : 1.000 dollar AS)

Tahun	Impor dari Utara	Ekspor dari Utara	Total
1998	92,264	129.679	221,943
1999	121.604	211.832	333.437

2000	152.373	272.775	425.148
2001	176.170	266.787	402.957
2002	271.575	370.155	641.730

Sumber : Departemen Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan

b. Sebagai Kunci Stabilitas Ekonomi Kawasan

Stabilitas keamanan sebuah kawasan tergantung pada stabilitas politik di negara negara yang ada di kawasan tersebut. Stabilitas keamanan sebuah negara akan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian sebuah negara atau negara lainnya. Artinya pertahanan keamanan sebuah negara yang stabil akan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian negara tersebut, dan juga akan mempengaruhi stabilitas perekonomian negara lain yang masih dalam satu kawasan.

Hal itu juga terjadi di kawasan Semenanjung Korea. Terjadinya stabilitas keamanan di dalam negeri Korea Utara juga sangat berpengaruh pada perkembangan perekonomian dalam negeri dan juga berpengaruh pada perkembangan perekonomian negara negara lain yang ada di sekitar Semenanjung Korea, termasuk juga Korea Selatan. Khususnya untuk Korea Selatan, penciptaan hubungan yang baik dengan Korea Utara sangat diperlukan karena dengan membina hubungan tersebut akan menimbulkan citra aman di kawasan semenanjung Korea. Banyak anggapan bahwa apabila hubungan Korea Selatan – Korea Utara baik maka stabilitas keamanan di Semenanjung juga aman. Hal ini dapat dipahami karena memang dua negara ini sejak perang Korea hingga sekarang adalah negara yang masih dalam status perang.

Korea Utara sebagai negara yang sejak lama kontra akan kehadiran Korea Selatan di Semenanjung Korea juga menjadi tantangan tersendiri bagi Korea Selatan. Dengan sistem pemerintahan yang diktator komunis tersebut sangat jauh berbeda dengan sistem Korea Selatan yang sangat demokratis. Korea Utara memiliki ancaman yang cukup tinggi dan apabila ancaman tersebut benar benar terwujud maka akan sangat mengganggu stabilitas

keamanan di kawasan, terutama ancaman akan persenjataan nuklir yang dimilikinya. Ancaman ini bukan hanya menyebabkan kekhawatiran di negara negara sekitar saja, akan tetapi juga cukup menciptakan kekhawatiran semua pihak yang memiliki kepentingan di Semenanjung Korea. Usaha Korea Selatan untuk membina hubungan dengan Korea Utara selalu dijalankan dengan penuh pertimbangan, apalagi setelah Korea Selatan di bawah pemerintahan sipil yang demokratis. Tindakan persuasif adalah salah satu cara untuk dapat menciptakan suasana yang kondusif dan aman di kawasan. Kemampuan Korea Utara yang semakin menurun dalam segi perekonomian oleh karena ideologi dan sistem pemerintahan yang tidak mampu menghadapi globalisasi dunia dimanfaatkan oleh Korea Selatan. Kemiskinan, kelaparan, Kekurangan pangan, kekurangan energi, kesehatan yang tidak memadai, dan banyak lagi kekurangan yang dialami oleh rakyat Korea Utara dicoba dipenuhi oleh Korea Selatan dengan kemampuan pemerintah sendiri ataupun bekerjasama dengan swasta Korea Selatan. Bantuan finansial, bahan pangan, program pariwisata dan program program lainnya (termasuk juga pertemuan keluarga yang terpisah) diselenggarakan dengan tujuan awal untuk membantu rakyat Korea Utara yang menderita terjerat oleh sistem negaranya. Akan tetapi hal tersebut adalah sebuah bagian dari politik Matahari Bersinar yang dicanangkan di masa pemerintahan Kim Dae Jung. Dengan pendekatan yang bersifat kooperatif dan mencoba membantu kesulitan Korea Utara maka akan meredahnya ketegangan di kawasan Semenanjung Korea. Juru bicara kepresidenan Republik Korea mengatakan presiden Roh telah menegaskan lagi tujuan pemerintah untuk mempercepat kerjasama ekonomi dengan Selatan untuk mendirikan sebuah infrastruktur dan mencapai produktifitas industrinya.

Hal ini pasti akan membuka zaman baru pembangunan ekonomi dari negara yang semakin baik.⁷

Pendekatan dengan melakukan kebijakan kooperatif dengan Korea Utara semenjak Korea Selatan di bawah pemerintahan sipil juga membuahkan hasil yang positif terhadap hubungan bilateral kedua negara ataupun dengan peningkatan keamanan kawasan Semenanjung Korea.

Pendekatan kooperatif ini lebih diterima Korea Utara, hal ini terbukti dengan terwujudnya Konferensi Tingkat Tinggi Inter – Korea di tahun 2000, kemudian diikuti oleh Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) di berbagai bidang. Dan setelah memanasnya hubungan Korea Utara dengan Amerika Serikat Korea Utara kembali dapat menerima tawaran rekonsiliasi dari Korea Selatan, hal itu dapat dilihat dari kehadiran Ri Jong-hyok, Kepala Deputi Komite Perdamaian Korea Utara untuk Asia Pasifik yang memenuhi undangan presiden Roh Moo Hyun dalam peringatan empat tahun Pertemuan Tingkat Tinggi Korea 2000, dan kemajuan lainnya adalah peredaan ketegangan di garis DMZ. Peredaan ketegangan ini adalah ditandai dengan disepakatinya pelepasan semua alat alat propaganda milik kedua belah pihak yang ada di garis perbatasan demiliterisasi (DMZ). Tentara Korea Selatan melepas semua peralatan *sound System* dan *Speaker* ribuan watt yang selama ini digunakan untuk menyebarkan propaganda suara yang diarahkan ke arah tentara Korea Utara di seberang, tentara Korea Selatan juga melepas semua spanduk dan baliho besar yang bertuliskan doktrin doktrin kebebasan dan demokrasi yang dihadapkan ke arah seberang. Hal tersebut juga dilakukan sama oleh tentara tentara Korea Utara.⁸ Kemajuan lain dalam peredaan ketegangan setelah ketegangan antara Amerika Serikat dan Korea Utara di tahun 2002 adalah adanya kontak radio antara kapal perang Korea Utara dan Korea Selatan.

Hal ini tentunya sebuah kemajuan yang positif dalam peredaan ketegangan di Semenajung Korea. Kontak radio kedua kapal perang ini terjadi saat kedua kapal ini sedang patroli di perairan barat mengikuti garis NNL (*North Limit Line*). Kontak radio yang diikuti oleh komunikasi dengan sandi *Morse* ini berlangsung selama lima belas menit dan masing masing kapal menggunakan nama puncak gunung tertinggi di masing masing wilayahnya (Puncak gunung *Baekdu* di wilayah Korea Utara dan puncak gunung *Halla* di wilayah Korea Selatan).⁹

⁹Now Korea Magazine, *Op.Cit.*, hal 6 81

Dengan terciptanya suasana aman di kawasan Semenanjung Korea maka proses perekonomian kemudian dapat berjalan dengan baik dan mesin mesin perekonomian Korea Selatan dapat berjalan normal sesuai dengan fungsinya. Apabila perekonomian dapat berjalan dengan baik, tanpa ada gangguan ancaman keamanan dari kondisi politik yang tidak kondusif, maka Korea Selatan pun dapat mencapai cita cita nasionalnya yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat Korea Selatan.



BAB V

KEBIJAKAN PERTAHANAN KEAMANAN KOREA SELATAN DALAM PENYELESAIAN KRISIS NUKLIR DI SEMENANJUNG KOREA

A. Perkembangan Kondisi Pertahanan Keamanan di Semenanjung Korea

Meskipun pada tanggal 15 Agustus 1945 bangsa Korea berhasil memperoleh kemerdekaannya, tetapi bangsa Korea harus menghadapi suatu tragedi pemisahan bangsa dan tanah air. Pemisahan ini terjadi setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang turut berperan penting dalam mengalahkan imperialis Jepang, masuk ke Semenanjung Korea yang dibagi tepat pada garis lintang utara tiga puluh delapan derajat.

Sesuai dengan keputusan konferensi tiga menteri antara Amerika Serikat, Inggris dan Uni Soviet di Moskow, negara negara sekutu mencoba mendirikan pemerintahan perwalian, baik di Korea Utara maupun di Korea Selatan, selama lima tahun di bawah kontrol PBB. Untuk itu Amerika Serikat dan Uni Soviet berusaha untuk membentuk komite gabungan Amerika Serikat dan Uni Soviet di Seoul.¹ Perwalian negara negara sekutu atas Semenanjung Korea ini mendapat tantangan keras dari masyarakat Korea. Demikian juga penolakan atas pemerintahan Republik Rakyat Korea juga ditantang oleh masyarakat Korea.

Untuk sementara, kedua bagian Korea masing masing berada di bawah kepemimpinan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di belahan Utara Semenanjung Korea, Uni Soviet memberikan dukungan mereka kepada Kim Ill Sung untuk menjalankan pemerintahannya atas Korea Utara. Pemerintahan Kim Ill Sung dijalankan dengan didasarkan pada pemikiran Komunis. Sedangkan dibelahan Semenanjung Korea, Amerika Serikat memilih Syngman Rhee sebagai pemimpin Korea Selatan. Pada bulan Februari 1946 di saat Kim ill Sung membentuk Komite Rakyat Sementara di belahan utara Semenanjung Korea dengan dukungan Uni Soviet, sementara itu di saat yang bersamaan Syngman Rhee tengah mempersiapkan pembentukan Dewan Perwakilan Demokratis di belahan selatan Semenanjung Korea. Di dalam kondisi seperti itu, komite gabungan Amerika Serikat dan Uni Soviet menghadapi jalan buntu. Kebuntuan itu mendorong

¹Kim Chum – kon, *The Korean War*, Kwang Myong Publishing Company, Seoul – Korea 1973 hal 15

Amerika Serikat mengajukan masalah Semenanjung Korea ke Perserikatan Bangsa Bangsa.

Dalam sidang umum PBB, diputuskan bahwa kelahiran pemerintah Korea ditetapkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang diikuti oleh seluruh rakyat Korea.

Keputusan PBB itu ditindak lanjuti oleh pemerintah Amerika Serikat dengan membentuk Komisi Sementara PBB untuk Korea (UNTCOK) sebagai pengawas pemilu yang akan segera dilaksanakan di Korea untuk membentuk pemerintahan Korea merdeka.

Keputusan PBB ini ditolak oleh Korea Utara dengan tidak memberikan ijin kepada seluruh kegiatan delegasi PBB di wilayah Korea Utara. Penolakan itu menyebabkan pemilu hanya dapat berlangsung di Korea Selatan pada bulan Mei 1948. Dari pemilu itulah lahir pemerintahan baru Republik Korea yang berlandaskan sistem demokratis dan kapitalisme pada tanggal 15 Agustus 1948 dengan Rhee Syngman sebagai presiden pertamanya.

Pemilihan umum yang berhasil membentuk Republik Korea itu dibalas oleh Korea Utara dengan mengadakan pemilihan umumnya sendiri pada tanggal 25 Agustus 1948 yang berhasil yang membentuk Republik Rakyat Demokrasi Korea dengan Kim il Sung sebagai perdana menteri. Kedua pemerintahan itu saling mengklaim bahwa mereka adalah satu satunya pemerintahan yang sah di Semenanjung Korea.

Dalam perkembangan pertahanan keamanan di kawasan Semenanjung Korea ini kemudian diwarnai oleh sebuah perubahan konstelasi politik pertahanan keamanan. Perubahan konstelasi politik pertahanan keamanan di kawasan Asia Timur Laut dikarenakan adanya perubahan besar besaran dalam tatanan politik global. Peta politik internasional sebelum dan sesudah perang dunia II mengalami sebuah perubahan. Perubahan ini terjadi karena dunia masuk ke dalam sebuah perang dingin yang cukup lama dan berkepanjangan. Perang dingin antara dua negara adikuasa Amerika Serikat dan Uni Soviet ini juga berimbas kepada hampir seluruh negara di dunia. Hal ini terjadi karena dua negara adikuasa ini memiliki hegemoni yang luas cakupannya, bukan hanya bidang pertahanan keamanan saja, akan tetapi juga sudah mulai masuk di bidang ekonomi, politik, sosial, dan bahkan

ideologi yang dianut beberapa negara jatuh pada dua pilihan yaitu kapitalisme atau komunisme.

Perubahan tatanan politik di tingkat global ini juga berimbas pada konstelasi politik di tingkat regional. Di benua Asia sendiri setelah berakhirnya perang dunia II banyak sekali perubahan yang terjadi. Terutama peranan Jepang di kawasan Asia menjadi berkurang setelah Nagasaki dan Hiroshima dijatuh bom atom. Setelah tentara Jepang ditarik mundur, daerah daerah yang dahulunya dikuasai oleh Jepang akhirnya banyak memproklamirkan diri sebagai negara merdeka. Namun beberapa wilayah yang telah ditinggalkan oleh Jepang belum dapat memproklamirkan diri sebagai negara yang berdaulat dan merdeka, karena wilayah yang telah terlanjur diduduki oleh dua kekuatan negara adikuasa Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dua kekuatan adikuasa ini cukup berperan dalam membantu untuk lepas dari penjajahan Jepang.

Perubahan yang cukup terlihat adalah perubahan yang terjadi dalam aliansi Blok Timur. Konstelasi politik keamanan Blok Timur mengalami perubahan setelah kejatuhan negara komunis Uni Soviet menjadi negara persemakmuran Rusia. Perubahan ini terjadi setelah terjadi perubahan orientasi politik dari negara-negara Blok Timur. Perubahan ini terjadi karena blok timur sudah tidak mampu lagi mempertahankan hegemoni ideologi komunisnya di dunia. Konstelasi kekuatan pertahanan keamanan antara Uni Soviet dan Cina guna mendukung keberadaan Korea Utara berubah ketika perang dingin berakhir yang ditandai dengan kehancuran Uni Soviet.

Di masa perang Korea 1950-1953, hegemoni komunisme blok timur begitu kuat di kawasan Semenanjung Korea. Kemampuan tentara Uni Soviet untuk menduduki setengah bagian dari wilayah Korea dengan usaha untuk mengusir tentara Jepang sangat berpengaruh dalam pembentukan ideologi rakyat Korea di sebelah utara. Wilayah Korea sebelah Utara pun pada akhirnya menggunakan ideologi stalinisme (sebagai pengembangan dari Komunisme) untuk menjalankan Republik Rakyat Demokrasi Korea. Serangan Korea Utara terhadap Korea Selatan pada tanggal 25 Juni 1950, yang diikuti oleh China dalam bulan yang sama, merupakan cacatan agresi yang tak dapat diragukan oleh siapapun, oleh karena itu demi keamanan bersama di Semenanjung Korea, maka

semua anggota PBB memberikan bantuan kepada Korea Selatan, sebagai korban agresi.² Dari enam puluh anggota Dewan Keamanan PBB, hanya enam belas saja yang mengirimkan pasukan bersenjata dari segala jenis, dan dari jumlah itu hanya Amerika Serikat, Kanada, Inggris Raya, dan Turki saja yang dapat dikatakan memberikan bantuan yang lebih dari pada sekedar pasukan basa-basi saja.

Korea Selatan, negara yang langsung bersangkutan, dan Amerika Serikat menyediakan kira-kira sembilan puluh persen pasukan bersenjata yang berperang di Korea. Ketika perang sedang berlangsung, salah satu negara besar, Cina, ikut serta sebagai agresor, sebagai partisipan aktif dalam agresi itu sendiri.

Peranan Cina sebagai salah satu negara blok timur yang masih bertahan hingga sekarang juga sangat besar terhadap Korea Utara. Di saat perang Korea, Mao Tse Tung sebagai pimpinan tertinggi Republik Rakyat China memerintahkan sukarelawan Cina untuk berangkat dan bertempur di Korea. Dan pada bulan November 1950 hingga Februari 1951 Cina mengerahkan kekuatan besar-besaran ke Korea. Keputusan Cina itu diambil dalam upaya untuk mempertahankan wilayah Korea Utara dari desakan pasukan PBB dan Amerika Serikat yang terus merangsek ke wilayah utara hingga melewati garis paralel ke-38.³

Setelah beberapa tahun bertahan, akhirnya ideologi "kiri" yang dianut oleh beberapa negara yang tidak mampu lagi menahan arus kapitalisme dan demokratisasi yang didengungkan oleh Blok Barat, untuk kali pertama tembok Berlin dirobohkan diikuti oleh gema reunifikasi Jerman Barat – Jerman Timur, dan ini berarti paham dan ideologi Fasis ataupun Neo Fasis yang berjaya di saat Jerman di bawah pemerintahan Hitler telah hancur. *Euphoria* dan kecenderungan masyarakat dunia untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan kebebasan juga merebak ke Uni Soviet. Ideologi Komunisme dan neo Komunisme yang berjaya dan telah lama mampu mengimbangi kapitalisme Blok Barat akhirnya harus tumbang.

²Hans J. Morgenthau, Kenneth W.T, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* (New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1978) hal.153

³Jeremy Issacs & Taylor Downing, *Cold War*, Bisnis Indonesia, Tanggal 28 Juni 2003, hal 4

Persatuan negara-negara di Rusia yang tergabung dalam Uni Soviet dan disatukan oleh semangat Komunisme akhirnya harus terpisah-pisah. Beberapa negara ini kemudian lebih memilih berdiri sendiri-sendiri dan kemudian membangun negara yang lebih demokratis. Dengan berkurangnya dukungan Komunisme di Korea Utara yang disebabkan oleh perkembangan politik internasional yang lebih condong ke arah liberalisme, maka hal ini menjadi ancaman tersendiri bagi Korea Selatan.

Peran dari Uni Soviet sudah sangat berkurang di Korea Utara menjadikan Korea Utara semakin tidak terkontrol dan memiliki kebebasan penuh untuk memutuskan kebijakannya, hal ini menjadikan Korea Utara lebih mandiri untuk memutuskan kebijakan politik, ekonomi, maupun pertahanan keamanannya.

Berdasarkan hal di atas maka Korea Selatan cukup terancam dengan kondisi tersebut. Ancaman tersebut terutama muncul pada perkembangan nuklir Korea Utara yang cukup berkembang dengan pesat. Persenjataan nuklir Korea Utara ini semakin berkembang ke arah invasi. Sementara itu perkembangan politik di Semenanjung Korea juga semakin tegang dengan sikap yang tertutup dan sensitif dari Korea Utara.

Dari hal di atas kondisi politik di Semenanjung Korea pasca kejatuhan Komunisme di satu sisi menguntungkan Korea Selatan, karena secara aliansi dukungan terhadap Korea Utara berkurang, tetapi hal tersebut juga menjadi ancaman bagi Korea Selatan karena karakter pemerintahan Korea Utara yang sensitif apabila tidak disikapi secara hati-hati akan menjadikan ketegangan yang menuju ke arah peperangan.

B. Kepentingan Korea Selatan Terhadap Aliansi Pertahanan Keamanan Dengan Amerika Serikat

1. Membendung Ancaman Invasi Korea Utara ke Korea Selatan

Bagi sebagian besar rakyat Korea Selatan, invasi Korea Utara ke Selatan di masa perang Korea adalah sebuah mimpi buruk yang tidak perlu terjadi kembali. Kendati di masa pemerintahan sipil akhir-akhir ini ditempuh langkah terobosan untuk kembali berhubungan dengan Korea

Utara, akan tetapi hal ini tidak membuat lengah pertahanan keamanan Korea Selatan. Hal ini dilakukan karena potensi kekuatan militer Korea Utara masih sangat diperhitungkan oleh banyak kalangan birokrat di masa pemerintahan sipil sekarang maupun oleh banyak kalangan militer Korea Selatan; karena ketika tidak ada negara yang ingin menyerang negara lain, maka tidak akan ada keyakinan bahwa tujuan yang lain bersifat damai sehingga masing-masing pihak harus mengakumulasi kekuatan pertahanan sebab tidak ada negara yang mengetahui bahwa pengakumulasi yang kekuatan ini bermotifasi untuk pertahanan saja, masing-masing negara harus mengaggapnya sebagai tujuan penyerangan.⁴

Kekuatan militer Korea Utara mengalami perkembangan yang naik turun. Setelah ditandatanganinya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Korea Utara tentang penghentian pengembangan senjata nuklir dalam *Agreement Agreed* di tahun 1994, pengembangan militer Korea Utara tidak begitu mengacu ke arah invasi, akan tetapi lebih mengacu ke arah pertahanan dalam negeri saja.

Sebetulnya pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara yang telah mengkwatirkan beberapa negara baik di tingkat regional maupun internasional oleh sebagian pengamat lebih dilihat sebagai pengimbang strategis (*strategic equalizer*), yaitu suatu senjata untuk menetralisasi keunggulan konvensional Korea Selatan yang masih mendapatkan banyak bantuan dari Amerika Serikat.⁵

Untuk masa yang dapat diperhitungkan ke depan, *adagium* lama *sivis pacem para bellum* (kalau ingin damai, bersiaplah untuk berperang) masih akan mendominasi dinamika politik internasional. Ancaman perang atau konflik bersenjata tetap merupakan suatu yang bukanlah tidak mungkin, selama kerjasama ekonomi tidak banyak memberikan kontribusi pada upaya keamanan bersama dan hubungan antar bangsa masih diwarnai oleh kesalingcurigaan.

⁴Gleen H. Syder, "The Security Dilemma in Alliance Politics," *World Politics* 36 No. 4, Juli 1984, hal. 461

⁵Kusnanto Anggoro, "Implication of Development Around the Korean Peninsula for Southeast Asia", Paper pada Kerja Pasific Utara, Tokyo, 4 April 1995, hal.23.

Peningkatan dengan cepat justru ketika hubungan Amerika Serikat – Korea Utara menegang pasca pernyataan Presiden George W. Bush yang menggolongkan Korea Utara sebagai bagian dari poros setan yang harus dihancurkan. Pernyataan provokatif dari presiden Amerika Serikat tersebut membuat Korea Utara kemudian mengaktifkan kembali aktifitas nuklirnya dan membangun lagi kekuatan militer yang siap untuk melakukan invasi. Peningkatan ketegangan ditandai dengan diaktifkannya salah satu fasilitas pengembangan senjata nuklir di daerah Yongbyon. Berikut adalah daftar tempat atau daerah dimana dibangun fasilitas nuklir Korea Utara.

Tabel. 6

Daftar Tempat/Daerah Fasilitas Nuklir Korea Utara

Nama Tempat/Daerah	Fasilitas
Kumchang-ri	Pemrosesan ulang nuklir
Yongbyon	Reaktor gas grafit, pemrosesan ulang nuklir, penyimpanan sampah nuklir, pengolahan bahan nuklir, tempat pengetesan bahan ledakan
Taecheon	Reaktor gas grafit
Kusong	Pemrosesan uranium
Pakchon	Tambang uranium, Riset / Pengembangan, pemrosesan uranium
Sunchon	Tambang uranium
Pyongsong	Riset / Pengembangan
Pyongyang	Riset / Pengembangan
Pyongsan	Tambang Uranium, pemrosesan uranium, pemrosesan ulang nuklir
Unggi	Tambang uranium

Nanam	Riset / Pengembangan
Kilchu	Riset / Pengembangan
Sinpo	Reaktor air
Kumho	Reaktor air
Hungnam	Tambang uranium
Hamhung	Riset / Pengembangan
Wonsan	Riset / Pengembangan

Sumber : *Center for Nonproliferation Studies* dalam Reuters

Di dalam perkembangan kekuatan militer Korea utara, menurut *BBC Jean's Information Group*, secara garis besar kekuatan militer Korea Utara total hingga saat ini adalah sebagai berikut :

1. Personel dengan jumlah 1.000.000 orang
2. Tank tempur dengan jumlah 3.000 unit
3. Kapal selam serbu dengan jumlah 22 unit
4. Pesawat tempur dengan jumlah 500 unit
5. Rudal scud dengan jumlah tidak terdeteksi
6. Rudal Nodong-1 dengan Jumlah tidak terdeteksi
7. Rudal Taepodong dengan jumlah tidak terdeteksi.⁶

Inti dari kekuatan militer Korea Utara adalah kemajuan teknologinya yang terus meningkat dan kemampuan untuk menciptakan persenjataan yang bersifat invasi bukan sekedar kemampuan bertahan. Persenjataan yang bersifat ancaman bagi negara lain inilah yang kemudian menaikkan kemampuan tawar Korea Utara di meja perundingan.

Berawal dari keterlibatannya atas pengembangan peluru kendali Cina, Korea Utara dengan cepat dapat menyerap alih teknologi pengembangan peluru kendali.

⁶www.bbc/Jean's Information Group.com, diakses tanggal 29 agustus 2004

Didukung dengan sumber daya alam yang memungkinkan dengan adanya ketersediaan bahan baku uranium (diperkirakan berjumlah dua puluh enam juta ton cadangan dengan empat juta ton yang telah digali), Korea Utara dengan cepat dapat mengembangkan peluru kendali dengan spesifikasi dan kemampuan yang beragam. Di tahun 1980an Korea Utara telah mampu membangun fasilitas *reprocessing spent-fuel* yang besar di kompleks Yongbyon tanpa bantuan dari pihakasing.⁷ Berikut adalah Kronologis pengembangan peluru kendali Korea Utara dan Spesifikasi dari setiap rudal buatan Korea Utara.

Tabel. 7

Kronologis Pengembangan Peluru Kendali Korea Utara

Waktu / Tahun	Aktifitas / Kegiatan
Awal 1970an	Terlibat dalam pengembangan peluru kendali Cina
1976 – 1981	Membeli rudal Scud – B buatan Uni Soviet dan Roket pendorong dari Mesir
1984	Uji tembak rudal Scud – B yang telah dikembangkan
1986	Uji tembak rudal Scud – C
1988	Menyebarkan rudal Scud – B dan Scud – C
1989	Mulai mengembangkan Rudal Rodong
1993	Uji Tembak rudal Rodong – 1
1994	Mengembangkan rudal Taepodong – 1
1998	Menyebarkan Rudal Rodong
Agustus 1998	Uji tembak rudal Taepodong – 1
September 1999	Mengumumkan penundaan uji coba rudal

⁷*Suara Pembaruan*, Tanggal 26 Januari 2001, "Ketika Korea Bergejolak", hal 12

Mei 2001	Memperpanjang penundaan hingga 2003
September 2003	Kim Jong il memperpanjang penundaan hingga setelah 2003

Sumber : afp/bbc dalam Koran Tempo tanggal 12 Desember 2002

Tabel. 8

Tipe dan Spesifikasi Peluru kendali Korea Utara

Tipe Rudal	Hulu Ledak (Kg)	Jangkauan (Km)	Status
Scud – Bahasa	1000	300	Siap beroperasi
Scud – C	500 – 700	550 – 600	Siap
Nodong – 1	750	1300	Beroperasi
Rodong – 1	1000	1300	Siap Beroperasi
Taepodong – 1	1000	2000	Uji Tembak
Taepodong – 2	1000	5000 – 6000	Dalam Pengembangan

Sumber : Arms Control Association dalam Reuters dalam Kompas tgl 12 Desember 2002

Pengembangan lain dari persenjataan nuklir Korea Utara ini adalah dihasilkannya produk senjata biologi dan kimia. Produk produk senjata biologi dan kimia ini diantaranya adalah berupa gas blister, gas saraf, gas yang mencekik, gas air mata, dan gas yang menyerang darah. Korea utara juga memiliki sedikitnya delapan buah pabrik yang memproduksi senjata jenis ini.⁸ Dalam rangka peningkatan kemampuan operasional peperangan biologi dan kimia, Korea Utara telah membentuk peleton peleton Nubika dalam tingkat Resimen. Penduduk sipil seperti halnya para anggota militer selalu dilatih secara rutin untuk mempertahankan perang bio-kimia.

⁸Kompas, 3 November 2002, "Kekuatan Perpendam Korea Utara", hal 3

Dan kemampuan Korea Utara saat ini telah mampu secara bersama sama melaksanakan serangan kimia dan biologi ke daerah depan dan belakang sekaligus dengan sistem penyebaran yang berbeda beda.

Bukan hanya kemampuan daratnya saja, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Korea Utara juga telah mampu melakukan serangan senjata biologi dan kimia.⁹

Senjata lain yang juga dimiliki oleh Korea Utara diantaranya adalah *Multiple Rocket Launcher (MRL)*, roket Frog-5 dan artileri dengan *propeller* sendiri berdiameter 170 mm dengan jarak tembak lima puluh kilometer, roket frog-7 dan MRL 240 mm dengan jangkauan tembak tujuh puluh kilometer.¹⁰

Dengan potensi kekuatan militer yang begitu besar ini menjadikan potensi ini sebagai sebuah alasan mengapa Korea Selatan terus menjalin aliansi pertahanannya dengan Amerika Serikat.

Kemampuan Militer Korea Utara untuk melakukan serangan secara mendadak menjadi pertimbangan yang menguatkan alasan Korea Selatan untuk tetap menjalin aliansinya dengan Amerika Serikat. Secara umum kekuatan Amerika Serikat di Korea Selatan juga sangat berperan terhadap situasi stabilitas keamanan regional di Semenanjung Korea. Dengan kekuatan tiga puluh tujuh ribu tentaranya Amerika Serikat berperan turut serta menjaga keseimbangan kekuatan pertahanan Korea Selatan. Tentara Amerika Serikat yang tergabung dalam *United State Force, Korea (USFK)* terdiri atas beberapa komponen yang siap untuk mempertahankan teritorial Korea Selatan dari segala invasi, termasuk juga invasi dari Korea Utara. Komponen USFK ini Terdiri dari :

⁹*Suara Merdeka*, Tanggal 12 agustus 2001, "Ketegangan Dunia dari Semenanjung Korea (Bagian I)", hal 9

¹⁰*Suara Merdeka*, Tanggal 14 Agustus 2001, "Ketegangan Dunia dari Semenanjung Korea (Bagian II)", hal 9

1. Angkatan Udara ke-7

Angkatan Udara ke-7 ini mempunyai misi merencanakan dan mengarahkan operasi komponen udara di Korea Selatan. Lebih dari sepuluh ribu personel masuk dalam pasukan yang bermarkas di pangkalan udara Osan, yang terdiri dari Sayap Tempur ke-51, Skuadron Kuda Merah ke-51, Skuadron Kuda Merah ke-554, Operasi Dukungan Udara ke-607, Intelijen Udara dan grup – grup Operasi Udara serta sayap tempur ke-8 di Kunsan AB

2. Angkatan Darat ke-8

Angkatan Darat ke-8 ini adalah elemen terbesar di Korea Selatan dan pasukan inti PBB dalam Perang Korea sejak 1950. Komando utama yang dibawahinya adalah Divisi II Infanteri, dan Komando *Theater Army Area* ke-19, dengan markas di Yongsan, Seoul.

3. Angkatan Laut (CNFK)

Misinya menyediakan keahlian Angkatan Laut Amerika Serikat ke Komando Gabungan untuk perencanaan dan pembuatan kebijakan dalam rangka pertahanan Korea Selatan. Bermarkas di Yongsan, Unsur ini memiliki beberapa detasemen di Chinhae dan Pohang.

4. Komando Operasi Khusus

Komando ini menyediakan pasukan Khusus dari angkatan darat, laut, dan udara dan bermarkas di kamp Kim, Seoul, dengan unit-unit subordinat yang ditempatkan di berbagai wilayah Semenanjung Korea.

5. Pasukan Marinir

Pasukan Marinir ini memiliki misi merencanakan dan mengarahkan Operasi Korps Marinir untuk mendukung USFK di berbagai wilayah di Korea dan bermarkas di Yongsan

6. Garnisun Yongsan

Komponen ini bermarkas di jantung Kota Seoul, menempati areal dengan gaya hidup sub urban perkotaan kecil seluas dua ratus lima puluh lima hektar.

Tepatnya di sebelah selatan Gunung Namsan dengan menempati seribu dua ratus dua puluh lima gedung.¹¹

2. Sebagai Jaminan Keamanan dari ancaman Komunisme di kawasan

Sebagai negara yang dari awal hingga sekarang telah terbentuk dengan pola hidup dan kinerja yang sangat liberal, Korea Selatan masih melihat bahwa Komunisme secara global tetap menjadi ancaman bagi negara-negara liberal. Komunisme yang lebih mengedepankan semangat nasionalisme, kepemimpinan dan peran besar negara, serta kebersamaan cukup sulit diterima oleh negara yang beraliran liberal. Oleh karena itu perlu sebuah usaha untuk membendung arus pengaruh ideologi komunisme masuk ke dalam wilayah Korea Selatan.

Negara yang masih dianggap dapat menjadi ancaman ideologi bagi Korea Selatan di Semenanjung Korea adalah Cina. Cina yang memiliki ideologi Komunis secara geografis cukup dekat dengan batas wilayah Korea Selatan. Batas kedua negara yang berseberangan ideologi ini hanya dibatasi oleh Korea Utara. Peranan Cina dalam menyebarkan pengaruh ideologi di kawasan Asia Timur sangat besar, termasuk perannya dalam pembangunan ideologi di Korea Utara. Pengaruh Cina terhadap Korea Utara sangat berpotensi untuk menjadi ancaman bagi Korea Selatan di Kawasan Semenanjung Korea. Sejak dari perang Korea hingga sekarang Cina sangat mempunyai peranan di Semenanjung Korea. Peranan yang diberikan ini tentunya mempunyai kepentingan yang akan disampaikan. Peran yang besar ini diberikan dalam upaya untuk memberikan pengaruh terhadap Korea Utara. Utara pada akhirnya akan menciptakan kesan dan *image* dari yang dipengaruhi kepada yang memberi pengaruh.

Dengan membangun aliansi di kawasan (dengan mencoba untuk memelihara ideologi yang telah ada di Korea Utara) maka kekuatan Cina semakin besar.

¹¹Koran *Tempo*, 4 Februari 2003, "Korea Selatan di Bawah Kekuatan Kapitalisme", hal 4

Cina sebagai negara besar dengan paham dan ideologi Komunis memerlukan *partner* untuk mencapai kepentingan nasional secara bersama sama dengan ideologi yang sama.

Sejak Desember 1978, Cina menentukan empat jenis modernisasi untuk mencapai pembangunan ekonomi. Salah satunya adalah pertahanan nasional. Untuk mencapai pertahanan nasional yang diharapkan, kemampuan militer terus ditingkatkan. Cina terus membangun sistem senjata baru dengan kombinasi hasil impor teknologi dan teknologi sendiri¹². Modernisasi persenjataan adalah wujud nyata dari pembangunan sistem senjata baru, disamping itu pengadaan senjata baru juga ditempuh untuk memenuhi sistem tersebut. Akan tetapi, yang perlu dicermati adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan keamanan Cina ini kemudian terus berkembang menjadi kemampuan militer yang bukan hanya sekedar untuk upaya membela diri saja, akan tetapi menjadi ke arah ekspansi. Sebagai contoh dari Rusia, Cina mendapat teknologi pengisian bahan bakar di udara, laboratorium merakit senjata, kapal selam "Kilo", dan pesawat Sukhoi SU – 27. Di dalam pertahanan lautnya Cina juga membangun *Fregat* dan *Destroyer* untuk memenuhi targetnya sebagai "Blue Water Navy" yang dapat diproyeksikan jauh dari garis pantainya.¹³

C. Kepentingan Korea Selatan Dalam Melakukan *engagement Policy* Terhadap Korea Utara

1. Mencegah Hegemoni Asing Terhadap Korea

Kepentingan negara negara asing di semenanjung Korea banyak dan saling tumpang tindih. Kepentingan beberapa negara asing ini kadangkala juga saling terkait dan berhubungan.

¹²*Media Indonesia*, Tanggal 12 Juni 2001, "Kekuatan Baru Untuk Kebangkitan Asia", hal 3
¹³*Ibid.*, hal 8

Amerika Serikat sebagai negara yang mempunyai peranan besar di Semenanjung Korea juga memiliki kepentingan yang besar juga di kawasan ini. Kepentingan utama Amerika Serikat adalah kepentingan perekonomian. Benua Asia adalah kawasan yang cukup banyak mendatangkan keuntungan bagi Amerika Serikat. Sumber daya alamnya, perkembangan perekonomiannya, dan lain sebagainya menjadi pertimbangan Amerika Serikat untuk menanamkan modal di beberapa kawasan di Asia, termasuk juga di kawasan Semenanjung Korea. Untuk tetap menjaga kepentingannya dapat dicapai, Amerika Serikat perlu menyebarkan pengaruhnya di kawasan dimana Amerika Serikat memiliki kepentingan. Kepentingan Amerika Serikat untuk menghambat laju pengaruh dan invasi ideologi Komunis juga adalah upaya untuk menjaga kepentingannya tidak terusik.

Negara lain yang merasa juga berkepentingan terhadap keamanan di kawasan Semenanjung Korea ini adalah Jepang. Jepang yang telah dapat menguasai Asia melalui bidang perekonomian ini juga merasa berkepentingan dengan kondisi keamanan di Semenanjung Korea. Jaminan keamanan menjadi prioritas utama Jepang untuk terus mengembangkan perekonomiannya. Hubungan pertahanan keamanan yang selama ini terjalin antara Amerika Serikat dan Jepang juga menjadi ancaman tersendiri bagi Jepang karena kemungkinan akan penyerangan Korea Utara terhadap Jepang dengan teknologi peluru kendali jarak jauh bisa saja terjadi. Di tahun 1998, Pyongyang memicu ketakutan Jepang dan seluruh dunia dengan melakukan tes penembakan atas rudal Taepodong-1, yang terbang diatas pulau utama Jepang Honshu menuju Samudera Atlantik. Dan lima tahun kemudian, Korea Utara meluncurkan pula ke arah laut timur rudal tipe Rodong-1 dengan jarak jangkauan 1.300 kilometer, setelah sebelumnya melakukan tes atas dua tipe rudal Scud.¹⁴ Pengalaman buruk seperti di ataslah yang kemudian mendorong Jepang merasa berkepentingan di wilayah Semenanjung Korea.

¹⁴*Kompas*, 4 April 2003, "Korea Utara Rencanakan Impor Senjata", hal 3

Dari hal seperti di ataslah kemudian Korea Selatan di masa pemerintahan sipil mulai melakukan pendekatan kepada Korea Utara dan mulai membatasi hegemoni asing yang selama ini terus berkembang di kawasan. Di masa pemerintahan sipil misalnya, beberapa pemimpin Korea Selatan seperti Kim Dae Jung dan Roh Moo Hyun semakin mantap untuk menekankan suatu

hubungan antara Korea Selatan – Amerika Serikat atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan. Tindakan ini diambil sebagai upaya untuk membatasi hegemoni yang terus berkembang di kawasan. Merintis untuk membina hubungan diplomasi dengan Korea Utara menjadi sangat penting untuk mengurangi hegemoni kekuatan asing di dalam negeri Korea Selatan. Dengan berhasilnya dibina hubungan dengan Korea Utara maka akan menunjukkan bahwa stabilitas keamanan di kawasan Semenanjung Korea relatif dapat terkendali. Apabila kesan ini tercipta, maka kehadiran kekuatan asing (terutama Amerika Serikat) untuk mempertahankan Korea Selatan dari ketidak stabilan politik dan keamanan menjadi tidak beralasan lagi. Apabila ini terwujud, secara otomatis hegemoni kekuatan asing (termasuk juga Amerika Serikat) akan dapat dibatasi dan bahkan dapat dihilangkan dari wilayah semenanjung Korea.

2. Menciptakan Stabilitas Keamanan di Kawasan

Semenjak disepakatinya gencatan senjata di tahun 1953, hubungan bilateral yang cukup nyata setelah itu adalah Konferensi Tingkat Tinggi Inter Korea di tahun 2000. Pertemuan bersejarah dua pemimpin negara yang masih dalam status perang ini juga membawa dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara dalam berbagai bidang, termasuk pula di bidang pertahanan keamanan.

Pada Pertemuan Tingkat Menteri kedua di Pyongyang, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan tingkat pejabat militer kedua Korea. Pada tanggal 13 September 2000, Menteri Angkatan Bersenjata Korea Utara Kim Il-chol mengirimkan surat kepada Menteri pertahanan Korea Selatan Cho Seong-Tae mengenai keseriusan Korea Utara terhadap

usulan pertemuan Menteri Pertahanan antar-Korea. Surat Menteri Kim adalah sebagai jawaban atas usulan Korea Selatan pada tanggal 11 September 2000. Pihak Korea Selatan dalam membalas surat Menteri Kim menyampaikan bahwa pihaknya mengusulkan agar Pertemuan Menteri pertahanan antar-Korea pertama hendaknya membahas berbagai *issues* yang berkaitan dengan peranan militer dalam proyek penyambungan kembali jalur kereta api Utara- Selatan yang menghubungkan Seoul-Sineuji. Agenda lain yang diusulkan Korea Selatan antara lain pengenalan *military confidence building measures* termasuk di dalamnya pembentukan *military hotline* dan beberapa hal lain yang menjadi perhatian bersama dalam rangka meredakan ketegangan militer kedua negara, karena dengan demikian dapat meminimalisir konflik, mengurangi ketegangan dan dapat menciptakan rasa saling percaya dan kerjasama.¹⁵

Military Confidens Building Measure dalam model CBM (Confidence Building Measures) yang merupakan pengalaman kerja sama negara-negara Eropa dalam upaya menciptakan keamanan dan kerja sama dalam bidang militer tergantung kemauan politik negara-negara yang terlibat.¹⁶

Setelah melewati beberapa proses untuk menetapkan kepastian tanggal, Pertemuan Menteri Pertahanan antar-Korea yang pertama akhirnya dilangsungkan di pulau Cheju, Korea Selatan pada tanggal 25 –26 September 2000. Lima anggota delegasi Korea Selatan dipimpin oleh Menteri pertahanan Cho Seong-tae dan lima anggota delegasi Korea Utara dipimpin oleh Menteri angkatan bersenjata Korea Utara Kim Il cho. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak menyepakati 5 (lima) butir persetujuan bersama yang antara lain berintikan¹⁷:

1. Korea Selatan dan Korea Utara sepakat untuk mengadakan *working level meeting* pada bulan oktober 2000.

¹⁵ *Kompas*, Tanggal 2 September 2002, Belajar dari Suksesnya KTT Inter- Korea tahun 2000”, hal 11

¹⁶ *Ibid.*, hal. 11

¹⁷ Craig. A. Synder, *Regional Security Structure*, dalam *Contemporary Security and Strategy*, London: Deakin University, 1999, hal. 114

2. Menyelenggarakan Pertemuan Menteri Pertahanan Kedua pada pertengahan Nopember 2000
3. Memperbolehkan kendaraan, personil, dan perlengkapan lainnya untuk memasuki masing-masing wilayah melalui Zona Demiliterisasi (DMZ)
4. Menjamin keselamatan dalam mendukung pembangunan penyambungan kembali jalur kereta api dan jalan raya.
5. Mengambil langkah bersama dalam pelaksanaan Deklarasi bersama.

Dengan terciptanya hubungan yang terbina terus ke arah yang lebih baik, Korea Selatan mengharapkan akan terjadi perdamaian di kawasan. Stabilitas keamanan akan terus meningkat apabila Korea Selatan dan Korea Utara mampu bertemu dalam satu meja untuk membicarakan tentang sebuah perdamaian di Semenanjung Korea.